

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhannya dengan memprioritaskan pembangunan daerah agar ketimpangan atau ketidakmerataan dapat terkendali (Hartono et al., 2018). Pertumbuhan ekonomi mendefinisikan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa memandang peningkatan itu cenderung tinggi atau rendah dari tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi akan selalu diiringi dengan kegiatan pembangunan ekonomi, disebabkan tujuannya untuk menghasilkan pendapatan per kapita yang tinggi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat ikut meningkat (Gosal et al., 2022).

Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi tantangan jangka panjang bagi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dijadikan ukuran untuk mencapai peningkatan produksi dan pelayanan barang dan jasa melalui kegiatan ekonomi yang terus tumbuh, jika faktor produksi semakin meningkat akan diikuti dengan bertambahnya kuantitas dan kualitasnya (Hellen et al., 2018). Pertumbuhan ekonomi memperlihatkan kinerja suatu kegiatan ekonomi dapat meningkatkan penghasilan masyarakat pada periode tertentu. Hakikatnya kegiatan ekonomi merupakan tahap pemanfaatan faktor produksi dalam menciptakan *output*. Proses ini menghasilkan siklus balas jasa bagi pemilik faktor produksi. Dengan pertumbuhan ekonomi, diharapkan pemasukan sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat (Mukarramah et al., 2019).

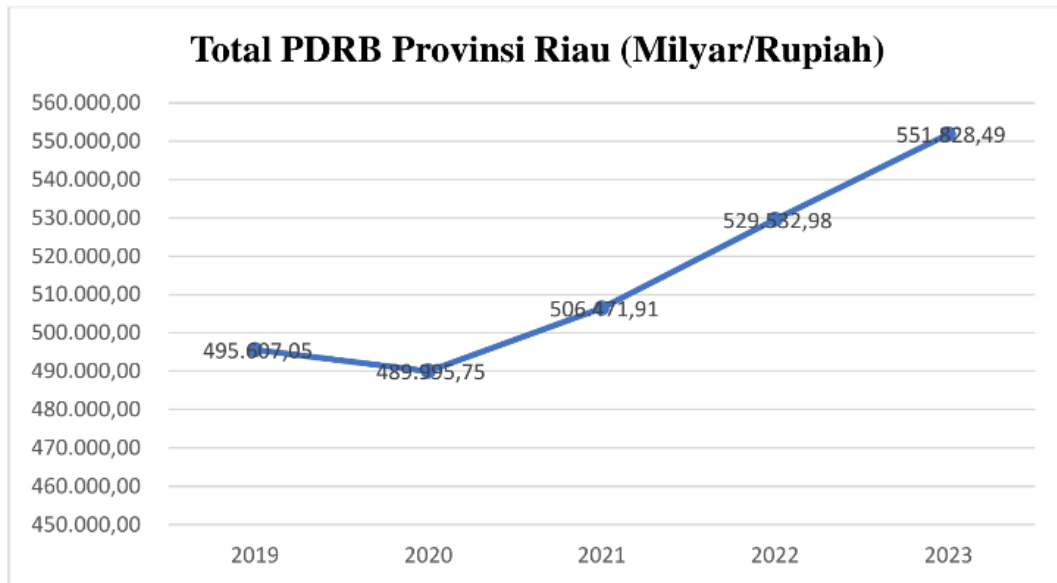
Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu cara mengubah keadaan ekonomi di suatu wilayah yang berkelanjutan menjadi unggul pada waktu tertentu. Jika pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan bersifat kuantitatif dan berjalan ke arah positif dapat disimpulkan bahwa negara ini sejahtera begitu pula sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan dengan meningkatnya kinerja perekonomian memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai indikator yang berperan penting untuk menganalisis kinerja perekonomian di suatu wilayah (Herita & Yuhendri, 2023). Pertumbuhan ekonomi dapat diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dapat menentukan daerah mana yang mengalami peningkatan atau penurunan kegiatan produksi yang memberikan penambahan nilai pada barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit produksi suatu wilayah pada periode tertentu berdasarkan harga berlaku atau harga konstan (Hartono et al., 2018).

PDRB adalah penambahan nilai pada barang dan jasa akhir yang diciptakan oleh seluruh unit produksi ekonomi di suatu wilayah. PDRB terdiri dari dua jenis dasar harga berlaku yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), yang menghitung nilai tambah barang dan jasa berdasarkan harga saat ini, digunakan untuk mengevaluasi struktur ekonomi suatu wilayah, serta perubahan dan pergeseran dalam perekonomian. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), yang menghitung nilai tambah barang dan jasa berdasarkan harga pada tahun referensi yang tetap, digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun, tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga (Ama & Renggo, 2022).

Potensi ekonomi regional di Indonesia masih didominasi sejumlah wilayah di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Lokasi dengan total PDRB paling tinggi yang berasal dari informasi Badan Pusat Statistik (BPS) adalah DKI Jakarta, sementara wilayah PDRB terendah adalah Provinsi Maluku Utara. Setiap daerah yang terdiri dari pulau-pulau dan provinsi karakteristik unik dalam perkembangan ekonomi lokalnya, yang akan terus menunjukkan peningkatan PDRB dibandingkan dengan periode sebelumnya. Di Indonesia, DKI Jakarta berada di posisi teratas dalam daftar 10 besar PDRB tertinggi, diikuti oleh Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di posisi ketiga dan keempat, Riau serta Kepulauan Riau di urutan kelima dan keenam, kemudian Sulawesi Tengah, Kepulauan Jambi, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan (Ahrizal, 2022).

Riau merupakan salah satu provinsi terbesar kedua di Pulau Sumatra. Kota terbesar dan Ibu Kota Provinsi Riau adalah Pekanbaru, terdiri atas 10 Kabupaten dan 2 Kota. Perekonomian Provinsi Riau secara terus menerus mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Provinsi Riau mempunyai sektor-sektor usaha yang patut dikembangkan seperti sektor migas, sektor jasa, sektor perdagangan, sektor konstruksi, sektor hotel dan restoran serta sektor industri. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang termasuk 5 provinsi yang memiliki PDRB tertinggi di Indonesia. Riau juga saat ini termasuk di antara provinsi-provinsi terkaya di Indonesia dengan kekayaan alam yang didominasi oleh minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2020).

Berikut tingkat PDRB di Provinsi Riau tahun 2019-2023:



**Gambar 1. 1 Total PDRB Provinsi Riau 2019-2023**

*Sumber: BPS, 2023*

Berdasarkan gambar, terlihat jika PDRB di Provinsi Riau terus mengalami peningkatan, pada tahun 2019 dan tahun 2020 telah terjadi penurunan diakibatkan oleh Covid-19 dari sebesar 495.607,05 Milyar/Rupiah ke 489.995,75 Milyar/Rupiah. Ekonomi perlahan-lahan pulih dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 506.471,91 Milyar/Rupiah dan pada tahun 2022 sebesar 529.532,98 Milyar/Rupiah serta tahun 2023 sebesar 551.828,49 Milyar/Rupiah. Peningkatan disebabkan karena Provinsi Riau perlahan bangkit dan kembali melakukan aktivitas ekonomi, utamanya migas dan juga perkebunan yang sempat terhenti akibat virus Covid-19. Perkembangan dan peningkatan PDRB tersebut diharapkan membuat Provinsi Riau dapat memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran untuk setiap masyarakatnya. Apabila PDRB semakin meningkat maka diharapkan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah atau daerah itu dapat tercapai (Islami, 2022).

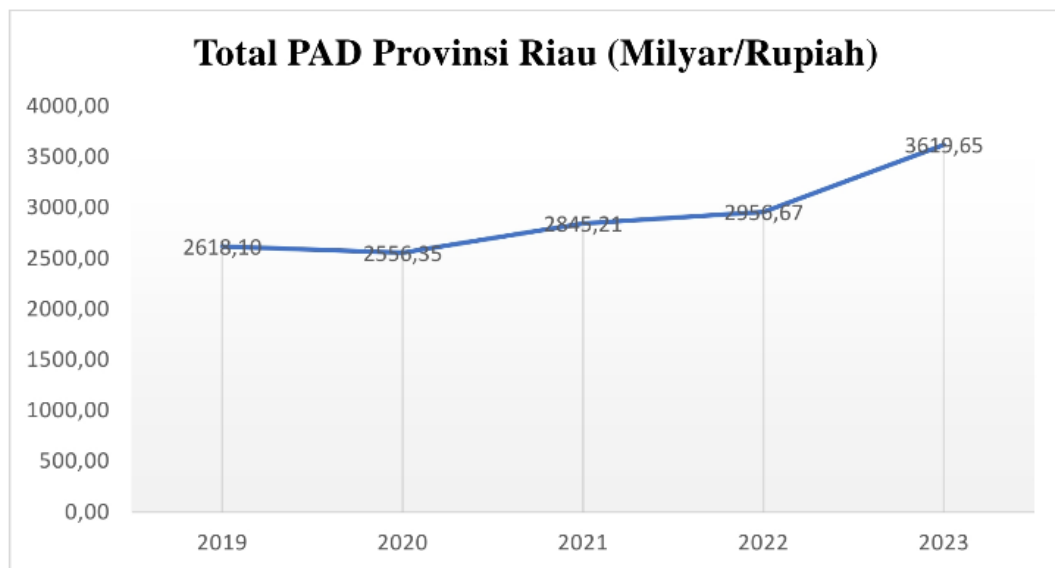
Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB dapat bersifat timbal balik. PDRB yang tinggi bisa menjadi indikator pertumbuhan ekonomi yang

kuat di suatu daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan potensi PAD. Disisi lain, PAD yang tinggi dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kebijakan lain yang dapat memperkuat struktur ekonomi regional, sehingga mendukung pertumbuhan PDRB di masa depan. Setiap daerah membutuhkan pembiayaan tidak hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tetapi juga dari pendapatan daerah sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi, naiknya PAD dapat menimbulkan pertumbuhan perekonomian sehingga wilayah atau daerah lebih sejahtera daripada pertumbuhan ekonomi sebelumnya (Islami, 2022).

Kapabilitas suatu wilayah mendistribusikan sumber daya yang dihasilkan daerah berupa PAD tergantung kepada kecakapannya mengganti suatu peluang ekonomi menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang menciptakan modal berputar untuk pembangunan wilayah pada waktu jangka panjang. Naik turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah menggambarkan besarnya perkembangan kemakmuran ekonomi warga negaranya. Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang setiap tahunnya semakin meningkat menunjukkan kesejahteraan ekonomi yang tinggi, namun penurunan ekonomi yang bernilai negatif maka kesejahteraan ekonomi menjadi rendah. Peningkatan pelayanan publik akan meningkatkan PAD sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja perekonomian (Makawaehe et al., 2023).

PAD merupakan perolehan penghasilan yang diciptakan bersumber dari dalam daerah dan dikumpulkan atas dasar peraturan daerah disesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD menjadi indikator untuk mengukur tingkat otonomi suatu daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah, semakin tinggi rasio

PAD dari total pendapatan maka akan semakin meningkatkan kemandirian di suatu wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Saputra, 2014). Berikut ini tingkat Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau tahun 2019-2023:



**Gambar 1. 2 Total PAD Provinsi Riau 2019-2023**

*Sumber: Direktorat Perimbangan Jenderal Keuangan, 2023*

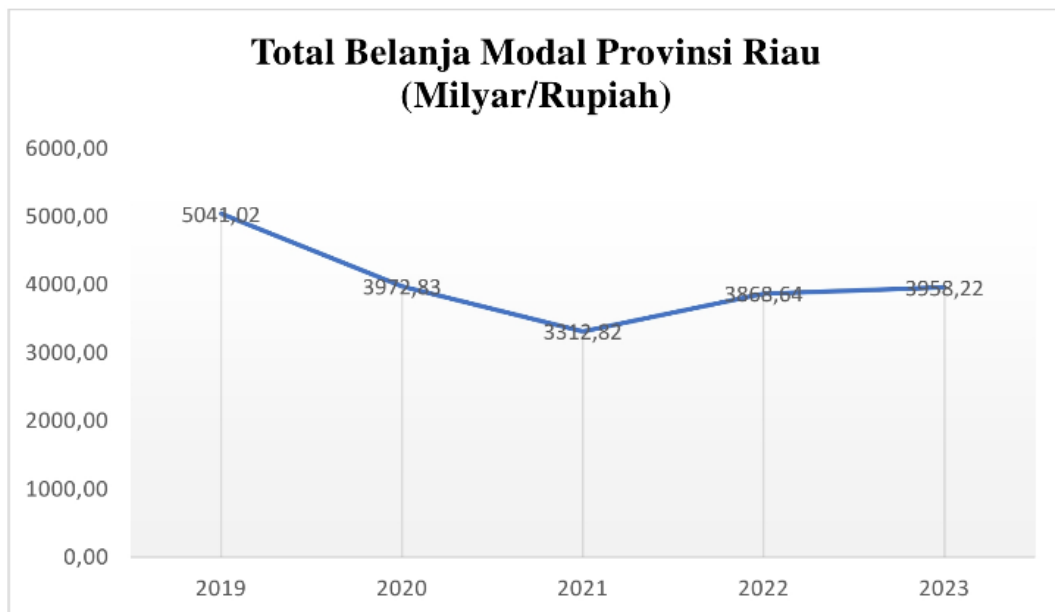
Berdasarkan gambar 1.2 terlihat bahwa jumlah PAD mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 2.618,10 Milyar/Rupiah dan juga tahun 2020 sebesar 2.556,35 Milyar/Rupiah akibat dampak dari Covid-19 yang tidak hanya berpengaruh di Provinsi Riau namun seluruh Indonesia. Hingga akhirnya terus mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 sebesar 2.845,21 Milyar/Rupiah dan tahun 2022 sebesar 2.956,67 Milyar/Rupiah hingga tahun 2023 sebesar 3.619,65 Milyar/Rupiah. Peningkatan ini dipicu oleh pemulihan ekonomi yang masih terjadi.

Belanja modal merupakan salah satu jenis belanja langsung dalam APBN/APBD, digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan sarana

dan prasarana pembangunan di bidang transportasi, pendidikan, dan kesehatan, agar masyarakat merasakan langsung manfaat dari pembangunan daerah. Hubungan belanja modal dan PDRB dapat saling mempengaruhi melalui peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas, sementara PDRB yang tinggi menciptakan insentif bagi lebih banyak investasi dalam belanja modal untuk memperluas *output* ekonomi (Rajab & Muchtar, 2023). Pada penelitian Ama & Renggo (2022), belanja modal berpengaruh secara positif dan signifikan dalam meningkatkan PDRB pada empat kabupaten di Kepulauan Sumba. Hal ini disebabkan belanja modal erat dengan istilah investasi. Investasi sangat baik untuk perkembangan suatu daerah dimana merupakan penanaman aset daerah sejak dini, meningkatnya investasi pemerintah seperti peralatan, mesin, tanah, gedung, infrastruktur akan menunjang pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan produksi barang dan jasa. Dengan aset pemerintah seperti tanah dapat didirikan bangunan seperti taman kota atau ruko sehingga dapat dikenakan retribusi dan dapat dipastikan dapat meningkatkan pendapatan daerah yakni PDRB.

Kaitannya dengan PDRB, proses pembangunan suatu daerah termasuk perencanaan dan prioritas pengembangan akan mempengaruhi alokasi belanja modal. Belanja modal di suatu daerah didasarkan beberapa faktor meliputi proses pembangunan, kebutuhan infrastruktur, sumber daya yang tersedia, serta kebijakan dan regulasi yang berlaku. Proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya, sering menjadi fokus peningkatan konektivitas dan fasilitas pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan belanja modal.

Daerah yang berkembang pesat memerlukan investasi dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Ketersediaan sumber daya, baik dalam bentuk anggaran keuangan, tenaga kerja, atau material, akan membatasi atau mempengaruhi skala dan jenis proyek yang dapat dilaksanakan. Penyediaan sumber daya yang memadai menjadi kunci dalam mengeksekusi proyek-proyek belanja modal dengan efektif. Kebijakan pemerintah dan regulasi yang berlaku, baik pada tingkat lokal maupun nasional, akan memengaruhi lingkup, waktu, dan jenis proyek yang dapat dilaksanakan. Regulasi tentang izin lingkungan, perizinan konstruksi, dan peraturan perpajakan dapat berdampak pada keputusan investasi. Berikut ini data belanja modal di Provinsi Riau tahun 2019-2023:



**Gambar 1. 3 Total Belanja Modal Provinsi Riau 2019-2023**

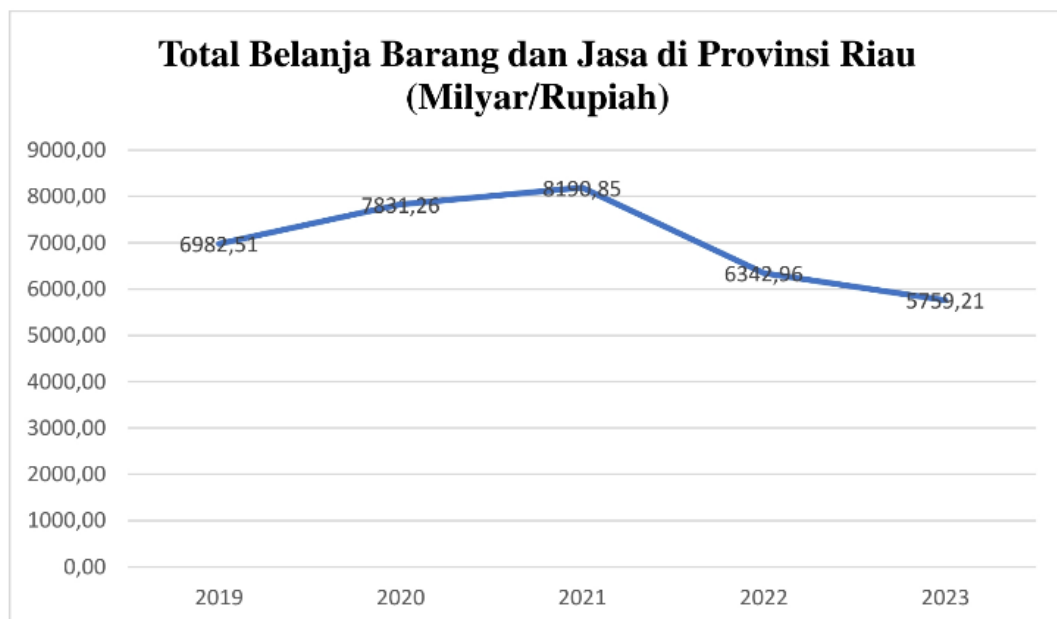
*Sumber: Direktorat Perimbangan Jenderal Keuangan, (2023)*

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat bahwa belanja modal mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 belanja modal sebesar 5.041,02 Milyar/Rupiah namun akibat dari Covid-19 mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 3.972,83 Milyar/Rupiah. Penurunan ini tentunya saling berkaitan dengan penurunan PDRB dan PAD yang membuat dana perlu dialokasikan terutama dibidang kesehatan.



Total belanja modal pada tahun 2021 kembali menurun sebesar 3.312,82 Milyar/Rupiah disebabkan masih dalam tahap pemulihan ekonomi sehingga perlu dianggarkan dana utamanya untuk hal kesehatan setelah pra Covid-19. Pada tahun 2022 belanja modal kembali mengalami peningkatan sebesar 3.868,64 Milyar/Rupiah hingga tahun 2023 meningkat sebesar 3.958,22 Milyar/Rupiah.

Terdapat hubungan antara Belanja Barang dan Jasa dengan PDRB, semakin tinggi belanja konsumsi, belanja pemerintah, dan investasi dalam barang dan jasa, semakin tinggi nilai PDRB suatu wilayah. Sebaliknya, penurunan dapat mengakibatkan *output* ekonomi dan PDRB juga ikut menurun (Gosal et al., 2022). Efek multiplier yang merujuk pada efek berlipat ganda dari peningkatan belanja, di mana setiap unit tambahan belanja akan memicu peningkatan produksi dan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah belanja tersebut. Investasi tambahan dalam modal fisik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan merangsang peningkatan produksi dan permintaan barang dan jasa (Sukirno, 2015). Berikut ini data Belanja Barang dan Jasa di Provinsi Riau tahun 2019-2023:



**Gambar 1. 4 Total Belanja Barang dan Jasa Provinsi Riau 2019-2023**

Sumber: Direktorat Perimbangan Jenderal Keuangan, 2023

Berdasarkan gambar 1.4 dapat diketahui data Belanja Barang dan Jasa mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 total Belanja Barang dan Jasa sebesar 6.982,51 Milyar/Rupiah dan pada tahun 2020 meningkat sebesar 7.831,26 Milyar/Rupiah hingga 2021 juga meningkat sebesar 8.190,85 Milyar/Rupiah. Penurunan terjadi setelah pemerintah memfokuskan terhadap penanganan Covid-19 di mana pada tahun 2022 hingga 2023 mengalami penurunan sebesar 6.342,96 Milyar/Rupiah dan 5.759,21 Milyar/Rupiah.

Pada penelitian yang dilakukan (Makawaehe et al., 2023) berjudul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan”, diperoleh hasil secara parsial, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Belanja Modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini sebanding dengan penelitian sebelumnya dalam penggunaan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal sebagai variabel independen. Perbedaannya terletak pada model analisis penelitian terdahulu yang menggunakan regresi linear berganda, sedangkan penelitian ini menggunakan model data panel. Lokasi penelitian sebelumnya dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan penelitian dilakukan di Provinsi Riau.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Nailufar (2023) berjudul “*The Effect of Employee Expenditure, Capital Expenditure, Goods and Service Expenditure on Gross Domestic Product in Indonesia*”, hasil dari penelitian ini juga secara parsial menunjukkan bahwa Belanja Barang dan Jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Belanja Modal tidak

berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, memiliki kesamaan yaitu menggunakan variabel Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa sebagai variabel independen. Perbedaan terletak pada model analisis penelitian terdahulu yang menggunakan regresi linear berganda, pada penelitian ini menggunakan model data panel, selanjutnya lokasi yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu di Indonesia sedangkan pada penelitian sekarang di Provinsi Riau.

Secara teori, semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa maka secara positif akan menaikkan Produk Domestik Regional Bruto yang diterima kabupaten/kota di Provinsi Riau. Hal ini juga akan mempengaruhi tingginya perolehan pendapatan daerah sehingga alokasi belanja pusat ke daerah dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa untuk melihat peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Berlandaskan penjelasan pada latar belakang penelitian ini, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Riau”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berlandaskan penjelasan pada latar belakang tersebut, disimpulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB di Provinsi Riau?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap PDRB di Provinsi Riau?

3. Bagaimana pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap PDRB di Provinsi Riau?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pemaparan rumusan masalah di atas, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB di Provinsi Riau
2. Mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap PDRB di Provinsi Riau
3. Mengetahui pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap PDRB di Provinsi Riau.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi peneliti serta pembaca mengenai teori makroekonomi tentang bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa terhadap PDRB yang ada di Provinsi Riau.
2. Penelitian ini diharapkan juga akan memperkaya literatur ilmiah dan memperdalam teori bagi peneliti dan pembaca, tetapi juga bermanfaat sebagai saran serta masukan yang berguna untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya terhadap penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan bagi pemerintah di Provinsi Riau, diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa secara efektif dan efisien sehingga tercapainya peningkatan pembangunan daerah yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
2. Hasil penelitian ini dapat dipublikasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat dengan harapan dapat digunakan secara bermanfaat.